**Voluntarisme sebagai Modal Sosial Pengelolaan Radio Komunitas:**

**Studi Kasus di Jarik III Cirebon**

1Dede Lilis Ch, 1M. Rochim, 1Nova Yuliati

1Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung

Jalan Tamansari No. 1 Bandung 40116

delilisubandy@gmail.com, mrochim5571@gmail.com, nova\_yuliati@yahoo.com

**Abstrak**

Jaringan radio komunitas (JARiK) III Cirebon merupakan gabungan radio komunitas yang berlokasi di daerah Cirebon, Kuningan, Majalengka, dan Indramayu yang hingga kini beranggotakan 11 radio komunitas. Jarik ini selain konsen dengan penyiaran, juga ikut aktif dalam kegiatan sosial serta melakukan advokasi pada masyarakat terutama untuk kasus KDRT dan *human trafficking*. Berpijak pada perspektif voluntarisme, tulisan mengupas metode radio komunitas dalam mengentaskan persoalan masyarakat. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi dan studi dokumen di tiga radio komunitas, yakni Baina FM, Bhuana FM, dan Caraka FM. Hasil yang diperoleh memperlihatkan bahwa kondisi sosiodemografis masyarakat melatari pendirian, tujuan dan operasionalisasi radio komunitas; layanan berbasis-masyarakat menjadi spirit pengelola radio komunitas; serta jiwa voluntarisme mendasari kinerja pengelola radio komunitas dalam mengentaskan persoalan masyarakat.

Kata kunci: komunitas, radio komunitas, layanan berbasis-masyarakat, voluntarisme.

***Abstract***

*Community radio networking (Jarik) III Cirebon is the affiliation of community radio in Cirebon, Kuningan, Majalengka and Indramayu. Jarik III consist of 11 community radios. Besides broadcasting, this Jarik actives in social action. They have been defensing people especially in human trafficking and domestic violence cases. Based on voluntarism perspective, this article elaborates how those radios conquer the society’s issue.* *This article based on research through qualitatif method with case study. Data was obtained through interview, observation, and document with three community radio administrator and they are Baina FM, Bhuana FM, and Caraka FM. Finding showed that: the background of the establisment, purpose and community radio operational were based by sosiodemografic condition of their own community; society-based service become an administrator community radio’s spirit; and voluntarism underlying perfomance of radio community administrator, it helps overcome people’s problem.*

*Keywords: community, community radio, community-based service, voluntarism.*

**PENDAHULUAN**

Berbicara tentang radio komunitas yang biasa disingkat rakom, sebagian orang seringkali membayangkannya dengan studio radio yang sempit, peralatan seadanya, hanya bertahan mengudara dalam waktu yang relatif singkat, penyiar yang tidak profesional, hingga dicap sebagai “radio gelap”. Memang gambaran tersebut menjadi potret beberapa radio yang muncul dari masyarakat akar rumput (*grassroot*).

Ada sejumlah alasan mengapa kemudian masyarakat membutuhkan radio komunitas, Birowo, Prakoso dan Nasir dalam buku *Mengapa Radio Komunitas* mengemukakan alasan berikut: (1) untuk mengekspresikan pendapat dan kepentingan, karena masyarakat berperan sebagai produser atau pembuat informasi, serta (2) disebabkan tidak semua anggota masyarakat dapat menjangkau siaran yang ada. Masih banyak anggota masyarakat yang tidak kena terpaan media massa umum. Mereka yang tinggal di tempat-tempat terpencil, di wilayah pedesaan, pulau-pulau kecil, dan wilayah yang jauh dari siaran televisi atau radio, tidak dapat menikmati media massa sebagaimana di tempat-tempat strategis lainnya (Birowo, Prakoso dan Nasir, 2007).

Oleh karena itu, pada November 2005 AMARC sebagai asosiasi internasional untuk radio komunitas yang beranggotakan lebih dari 3000 anggota dari 116 negara melakukan Kongres di Jakarta dengan menghasilkan “*Jakarta Declaration*” yang dengan tegas meminta pemerintah untuk memberikan peraturan yang kondusif bagi pengembangan radio komunitas di seluruh wilayah karena rakom memegang peran penting dalam proses demokratisasi dan pembangunan.

Sejak pasca orde baru, di Indonesia mulai muncul dan berkembang radio komunitas di berbagai daerah. Di Indonesia hingga tahun 2013 terdapat 19 JRK wilayah provinsi yang sudah bergabung dengan Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI). Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah radio komunitas terbanyak dibandingkan provinsi lainnya, yakni 65 radio komunitas yang sudah mendapatkan ijin operasional dan tersebar di berbagai kota dan kabupaten.[[1]](#footnote-1)

Dari sekian daerah di Jawa Barat, Cirebon merupakan daerah yang radio komunitasnya terus berkembang dan bergabung dalam sebuah jaringan yang dikenal sebagai Jaringan Radio Komunitas (Jarik) III Cirebon beranggotakan 11 radio komunitas yang tersebar di daerah Cirebon, Kuningan, Majalengka, dan Indramayu.

Hal yang menarik dari Jarik ini ialah mereka tidak hanya konsen dalam dunia penyiaran, namun juga aktif dalam kegiatan sosial masyarakat dan peduli terhadap persoalan yang terjadi di komunitasnya, misalnya rakom menerima dan membantu pendampingan kasus buruh migran yang menimpa masyarakat Cirebon sekitar. Hal ini karena minimnya posko pengaduan kasus Buruh Migran Indonesia (BMI) dan kecenderungan yang mulai tumbuh di masyarakat untuk melaporkan kasus melalui rakom, sehingga membuat pengurus Jarik III Cirebon berupaya semaksimal mungkin untuk membantu penanganan kasus-kasus yang dilaporkan.

Jarik III Cirebon juga bergabung dengan jaringan masyarakat anti trafficking (Jimat) yang beranggotakan organisasi nonpemerintah (ornop) se-wilayah III Cirebon, sehingga mereka sudah melakukan pengarusutamaan buruh migran melalui radio komunitasnya. Selain itu, rakom juga menjadi inisiator pembentukan Gerakan Desa Membangun (GDM). Sementara itu, untuk meningkatkan kapabilitas penyiaran, pengelola rakom juga mengikuti berbagai pelatihan yang diselenggarakan oleh berbagai pihak.

Fenomena Jarik III Cirebon ini semakin menegaskan bahwa betapa rakom ialah sebuah lembaga penyiaran potensial yang harus ditumbuh-kembangkan dan dikaji secara serius melalui pendekatan ilmiah sehingga berkontribusi pada perkembangan media masyarakat akar rumput.

Urgensi kajian ini seiring dengan pernyataan Edwin Jurriëns dari School of Asian, African, and Amerindian Studies Leiden University yang mengatakan bahwa, “Sejak reformasi, dunia radio di Indonesia mengalami perubahan penting. Salah satu perkembangan baru adalah munculnya radio komunitas, yang berfungsi sebagai alternatif untuk radio pemerintah dan radio swasta. Hanya, sampai sekarang fenomena radio komunitas hanya dibicarakan di buku panduan radio atau brosur NGO, dan belum mendapat perhatian ilmiah” (Jurriëns, 2003: 116-117).

Apalagi hingga kini, dari sekian banyak radio komunitas yang ada, hampir seluruhnya ialah swadaya masyarakat dengan prinsip manajemen: dari, oleh, untuk, dan tentang komunitas. Tentu saja, perkembangan rakom ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ditambah lagi, saat ini mulai dirasakan cukup banyak manfaat dan peran strategis radio komunitas bagi masyarakat.

Oleh karenanya, dengan berpijak pada perspektif voluntarisme tulisan ini ditujukan untuk mengkaji lebih lanjut pengelolaan radio komunitas Jarik III Cirebon dalam mengentaskan persoalan masyarakat dengan fokus untuk mendeskripsikan dan memetakan hal-hal berikut: (1) latar belakang pendirian, tujuan, dan operasionalisasi radio komunitas Jarik III Cirebon; (2) spirit pengelola radio komunitas dalam memenuhi kebutuhan komunitas; serta (3) prinsip kinerja pengelola rakom dalam membantu mengatasi persoalan masyarakat.

Untuk mengeksplorasi agar temuan kontekstual dengan studi yang dilakukan, maka kajian literatur yang mendasari konsep-konsep utama akan penulis paparkan terlebih dahulu. Istilah komunitas berkaitan dengan banyak fenomena, pola penafsiran, dan asosiasi. Jika diartikan sebagai suatu bentuk kolektivitas, komunitas menurut Victor Azarya biasanya merujuk pada: (1) suatu kelompok yang para anggotanya menghuni ruang fisik atau wilayah geografis yang sama di lingkungan tetangga, desa atau kota; atau (2) suatu kelompok yang anggota-anggotanya memiliki ciri-ciri serupa, yang biasanya dihimpun oleh suatu rasa memiliki, atau bisa pula oleh ikatan dan interaksi sosial tertentu yang menjadikan kelompok itu sebagai suatu entitas sosial tersendiri. Contohnya ialah suku bangsa atau etnik (Azarya, 2000: 145).

Komunitas yang dimaksud dalam tulisan ini meliputi dua penafsiran tersebut, yakni komunitas dalam pengertian secara geografis dimana para anggotanya tinggal di suatu desa, serta komunitas dalam pengertian adanya interaksi sosial antara anggota dan ikatan yang menghasilkan suatu rasa memiliki (*sense of belonging*). Rasa memiliki itu relevan dengan lahirnya radio komunitas di suatu desa yang selama ini lebih banyak didirikan dan beroperasi dari hasil swadaya masyarakat, sehingga radio komunitas merupakan radio milik warga. Selain itu, prinsip operasionalisasi radio komunitas juga didasarkan pada asas: dari, oleh, untuk, dan tentang komunitas.

Dalam lanskap media, radio komunitas merupakan salah satu media alternatif. Tipologi pendekatan media alternatif didasarkan pada pandangan Anthony Giddens (1984) yang membaginya diantara teori sosial objektif dan subjektif. Menurutnya, objek ialah struktur masyarakat yang didefinisikan sebagai “aturan-aturan dan sumber-sumber daya yang diimplikasikan dalam reproduksi sosial, sehingga stabil dalam lintas waktu dan ruang” (Giddens, 1984: xxxi dalam Sandoval, 2009: 3), sementara itu, subjek dipahami sebagai “agen manusia yang berpengetahuan” (*the knowledgeable human agent).* (Giddens, 1984: xx dalam Sandoval, 2009: 3).

Tulisan ini mengkaji radio komunitas dari sudut pandang pendekatan subjektif yang lebih memfokuskan pada aktor media dan bagaimana cara mereka memproduksi media alternatif. Media dalam pendekatan ini dapat memiliki efek sosial emansipatori jika berkontribusi pada demokratisasi akses terhadap produksi media dengan memberikan masyarakat sebuah suara. Pendekatan subjektif karenanya memperlihatkan pemahaman tentang media alternatif sebagai media partisipatoris.

Banyak pendekatan untuk media alternatif. Wacana media komunitas juga secara luas berorientasi terhadap praktik aktor-aktor media. Pendekatan media komunitas—salah satunya ialah radio komunitas—merupakan pendekatan subjektif karena fokusnya ialah akses partisipatori pada produksi media dan pemberdayaan individu-individu. Dalam konteks ini, media komunitas dipahami sebagai media yang melayani sebuah komunitas geografis yang spesifik atau komunitas kepentingan, serta mengijinkan non-profesional untuk aktif terlibat dalam produksi, organisasi, dan manajemen media (Lewis, 1976:61; Jankowski, 2003:8; Coyer, 2007; KEA, 2007:1; Peissl dan Tremetzberger, 2008:3 dalam Sandoval, 2009: 5).

Menurut UU No. 32/2002, ada tiga tipologi radio di Indonesia, yaitu (1) radio siaran publik, (2) radio siaran komersial dan (3) radio siaran komunitas. Radio komunitas dibedakan dengan radio publik atas dua karakteristik: (1) Radio komunitas melayani kepentingan komunitas yang secara geografis terbatas, sedang radio publik melayani kepentingan berskala besar yang secara geografis melingkupi seluruh wilayah nasional, (2) Radio komunitas, badan hukum yang mengandalkan kepemilikan, pendanaan dan pengelolaan dari faktor loyalitas komunitas, sedangkan radio publik memperoleh dukungan dana resmi dari negara.

Beberapa hasil riset terdahulu juga memperlihatkan bahwa radio komunitas memberikan dampak positif bagi masyarakat. Haryanto dan Ramdojo (2009:126-127) memaparkan hasil survei rakom di lima daerah: Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tenggara, serta FGD di Yogyakarta dan Jakarta pada tahun 2008, yang mengungkapkan peran strategis radio komunitas, yakni: sebagai media informasi dan hiburan, advokasi, pendampingan masyarakat, dan benteng budaya lokal; sebagai media alternatif radio komunitas lebih dekat di hati para pendengarnya dibandingkan *mainstream media*, karena terlibat dalam masalah-masalah warga seperti dalam bidang politik, kesehatan, dan kesejahteraan; serta pihak pemangku kepentingan atas radio komunitas melihat radio komunitas memiliki potensi besar menghasilkan media alternatif yang kontekstual untuk kepentingan warga masyarakat yang kerap tak mendapatkan informasi yang sesuai dengan kebutuhannya.

Kemudian, penelitian Edwin Jurriëns dalam Jurnal *Antropologi Indonesia 72* (2003), yang berjudul “Radio Komunitas di Indonesia: ‘New Brechtian Theatre’ di Era Reformasi?” meneliti tentang radio komunitas yang berkembang di Jawa Tengah. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa radio komunitas di Indonesia sebagai alternatif antara radio publik dan radio komersial setelah jatuhnya Soeharto pada 1998. Menurutnya, dua hal penting dari rakom ialah bahwa radio komunitas memberikan seluruh anggota komunitas akses informasi yang sama dan mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif dalam manajemen dan produksi siaran. Kedua tampilan ini mendorong kesadaran-diri masyarakat dan rasa memiliki komunitas. Keberadaan radio komunitas menunjukkan bahwa hak dan kewajiban demokratis dalam masyarakat Indonesia mendorong kelompok sosial untuk mengekspresikan dirinya tanpa intervensi pihak lain, dan berkontribusi terhadap keragaman media Indonesia.

**METODE PENELITIAN**

Tulisan ini berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan temuan dengan latar alamiah dan berorientasi pada pengelola radio komunitas sebagai pelaku, karena sebagaimana Stake katakan, “metode kualitatif berdasarkan pada premis bahwa realitas dibuat dalam interaksi sosial (dikonstruksi secara sosial), dan karenanya harus dipahami dari subjek itu sendiri.” (Denzin dan Lincoln, 2000 dalam Rochwulaningsih, 2015: 3).

Lebih lanjut Denzin dan Lincoln juga mengungkapkan bahwa metode kualitatif, “menelaah hal-hal yang berada dalam lingkungan alamiahnya, berusaha memahami, atau menafsirkan fenomena berdasarkan makna-makna yang orang berikan kepada hal-hal tersebut. Secara konvensional metodologi kualitatif cenderung diasosiasikan dengan keinginan peneliti menelaah makna, konteks, dan suatu pendekatan holistik terhadap fenomena” (Mulyana dan Solatun, 2007:5-6).

Adapun pendekatan kualitatif yang digunakan ialah studi kasus agar mampu menggambarkan realitas secara komprehensif dari berbagai sumber, sebagaimana John W. Creswell ungkapkan,

“*Case study research is a qualitative approach in which the investigator explore a real-life, contemporary bounded system (a case) or multiple bounded systems (cases) over time, through detailed, in-depth data collection involving multiple sources of information (e.g. observation, interview, audiovisual material, and documents and reports), and reports a case description and case themes. The unit of analysis in the study might be multiple cases (a multisite study) or a single case (a within-site study)* (Creswell, 2013: 97).

Penelitian studi kasus merupakan sebuah pendekatan kualitatif dimana investigator mengeksplorasi kehidupan nyata, baik berupa sebuah kasus ataupun multi kasus sepanjang waktu secara detail, koleksi data yang mendalam meliputi sumber-sumber informasi yang beragam—seperti observasi, wawancara, materi audiovisual, dokumen dan laporan—serta melaporkan sebuah ‘deskripsi kasus’ dan ‘tema-tema kasus’.

 Unit analisis dalam studi ini merupakan multi kasus yang mengkaji kasus di tiga radio komunitas anggota Jarik III Cirebon, yaitu: Baina FM di Desa Babakan Mulya Jalaksana Kab. Kuningan, Bhuana FM di Desa Cangkoak Dukupuntang Kab. Cirebon dan Caraka FM di Desa Ciborelang Jatiwangi Kab. Majalengka. Informan penelitian ialah empat orang pengelola di ketiga rakom yang memiliki jabatan sebagai ketua dan bendahara. Pemilihan informan berdasarkan pada *purposive sampling*, yakni orang-orang yang dianggap mengetahui, memahami dan mengalami praktik-praktik pengelolaan di rakomnya masing-masing.

Sementara itu, untuk tahapan dalam penelitian dibagi menjadi empat langkah, yakni: desain, pengumpulan data, analisis, dan pelaporan. Kemudian, untuk mengeksplorasi temuan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumen. Selanjutnya, untuk menganalisis data mengacu pada metode analisis data interaktif dari Miles dan Huberman yang meliputi: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan dengan penarikan atau verifikasi (Miles & Huberman, 1992:16-21).

# HASIL DAN PEMBAHASAN

**Kehadiran Radio Komunitas Berlatar Sosiodemografis Masyarakat**

Kondisi sosiodemografis masyarakat melatari pendirian, tujuan dan operasionalisasi radio komunitas, karena memang radio komunitas lahir di tengah-tengah masyarakat dan didorong oleh kebutuhan bermedia pada masyarakat di tingkat akar rumput (*grassroot*), yang tidak mereka peroleh dari media arus utama (*mainstream media*).

Berdasarkan temuan penelitian diperoleh tiga tipologi latar sosiodemografis masyarakat yang berbeda-beda pada setiap rakom sebagaimana diilustrasikan berikut,

Gambar 1. Latar sosiodemografis masyarakat dan orientasi rakom

Kondisi sosiodemografis ini sangat mempengaruhi tujuan dan orientasi rakom, karena idealnya setiap rakom berorientasi pada masyarakatnya dengan melibatkan masyarakat dalam praktik pengelolaan rakom. Salah satu deskripsi klasik tentang radio komunitas diformulasikan dalam antologi kisah tentang inisiatif radio komunitas, *A Passion for Radio*, yang dikompilasi oleh Bruce Girard (1992):

*Community radio [is] a type of radio made to serve people; radio that encourage expression and participation and that values local culture. Its purpose is to give a voice to those without voices, the marginalized groups and to communities far from large urban centers, where the population is too small to attract commercial or large-scale state radio* (Girard, 1992: ix dalam Jankowski, 2002: 7).

Lebih lanjut, Girard juga mengatakan bahwa “radio komunitas tidak hanya untuk berpartisipasi dalam kehidupan komunitas, tetapi juga mengijinkan komunitas untuk berpartisipasi dalam keberlangsungan stasiun. Partisipasi ini pada tingkat kepemilikan, pemrograman, manajemen, pengarah, dan finansial” (Girard, 1992: 13 dalam Jankowski, 2002: 7).

Karenanya, radio komunitas memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan radio komersial. Fokus yang khas dari radio komunitas menurut buku panduan radio komunitas yang diterbitkan UNESCO (2001), “radio komunitas berusaha untuk membuat pendengar sebagai protagonis (tokoh utama) melalui keterlibatan mereka dalam seluruh aspek dari manajemen dan produksi programnya, dan dengan menyajikan kepada mereka program yang akan membantu mereka dalam pembangunan dan kemajuan sosial di komunitas mereka” (Fraser dan Estrada, 2001: 15; Jurriëns, 2003: 118; Lilis Ch, Yuliati, dan Rochim, 2009: 149).

Carlos A. Arnaldo dalam *Community Radio Handbook* juga mengungkapkan bahwa, “radio komunitas ialah proses atau even sosial dimana anggota komunitas bergabung bersama untuk mendesain program-program dan memproduksi serta mengudarakannnya. Kemudian mengambil peran utama sebagai aktor-aktor dalam mencapai tujuan mereka sendiri” (Fraser dan Estrada, 2001). Kemudian, Ericka Tucker juga melihat karakteristik yang sama berkaitan dengan hadirnya radio komunitas dalam sebuah masyarakat. Melalui risetnya yang mencermati stasiun-stasiun radio komunitas di Negara Berkembang, USA dan Eropa, ia melihat bahwa rakom menyuarakan hal yang sama, yakni bahwa “dimana ada radio komunitas, maka ada keterlibatan komunitas yang dapat meningkatkan kapasitas komunitas untuk bertindak sebagai pengecek yang kuat yang menyerang kuasa pemerintah dan korporasi, yang dapat memobilisasi warga atas persoalan komunitas dan memberikan forum untuk mengembangkan solusi-solusi atas berbagai persoalan” (Tucker, 2013: 412).

Ini artinya eksistensi radio komunitas ditengah-tengah masyarakat berpijak pada lokalitasnya, sebagaimana ditegaskan oleh Tanja E. Bosch—pendiri stasiun Bush Radio dan trainer UNESCO pada radio komunitas— tentang “*Sustaining community radio stations*” berikut,

*“despite challenges around sustainability, community radio station are flourishing as concrete manifestations of an alternative public sphere, with the increasing conglomeration of the ownership of masss media, the role of community radio becomes important. For more than fifty years radios has been the most appealing tool for participatory communication and development. Radio is the most potentially participatory medium and has its roots in the community, which guarantees that communication processes take the regional reality as a starting point* (Bosch, 2007: 29).

Radio komunitas merupakan bukti nyata dari suatu bentuk alternatif ruang publik apalagi dengan adanya konglomerasi kepemilikan media massa, maka radio komunitas menjadi perangkat yang potensial bagi komunikasi partisipatori dalam pembangunan masyarakat, karena akarnya pada komunitas akan menjamin proses komunikasi regional dan lokal sebagai titik pijaknya.

**Layanan Berbasis-Masyarakat sebagai Spirit Pengelola Radio Komunitas**

Terdapat perbedaan antara lembaga penyiaran publik, komersial, dan komunitas. Lembaga penyiaran publik dan komersial termasuk kategori memperlakukan pendengar sebagai objek, sedangkan radio komunitas memperlakukan pendengar sebagai subjek dan pesertanya terlibat dalam penyelenggaraannya (Fraser & Estrada, 2001).

Karakter yang berbeda pada praktik manajemen radio komunitas dalam memposisikan pendengar sebagai subjek dalam operasionalisasi radionya, baik sebagai pengelola, penyiar, maupun pendengar, menimbulkan kesadaran pada pengelola rakom bahwa rakom lahir karena digagas oleh masyarakat dan bertahan atas dukungan masyarakat pula yang selama ini dimarjinalkan oleh media arus utama (*mainstream media*).

Marjinalisasi tersebut sangat terasa ketika hampir semua konten media massa bernuansa nasional dan global, sehingga masyarakat di daerah pinggiran tidak pernah tersentuh oleh media tersebut. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bermedianya, karena tidak ada informasi yang dekat dengan kehidupan keseharian mereka serta peristiwa dan isu-isu lokal yang akan membantu komunitas dalam mengatasi berbagai persoalan kehidupannya.

Kehadiran radio komunitas, meskipun kurang tepat untuk disebut sebagai *panacea*, obat mujarab, namun tidaklah berlebihan jika mengatakan bahwa rakom memiliki fungsi yang strategis dan potensial untuk memenuhi kebutuhan informasi serta hiburan masyarakat pinggiran, karena konten rakom memang berorientasi pada kebutuhan lokal masyarakat dan menyentuh berbagai persoalan kehidupan nyata mereka.

Mengapa konten program di radio komunitas dapat membantu masyarakat? Hal ini karena didasarkan pada unsur-unsur kunci konsep radio komunitas yakni “akses dan partisipasi” (Jurriëns, 2003:118). Akses berarti bahwa semua anggota komunitas mempunyai peluang yang sama untuk menerima siaran sedangkan partisipasi berarti bahwa pendengar secara aktif terlibat dalam manajemen dan produksi siaran radio komunitas.

Kedekatan relasi yang dibangun antara rakom dan masyarakatnya, memang dimulai dari mulai gagasan berdirinya, beroperasinya, hingga bertahan dan berkembangnya rakom. Tanpa kedekatan hubungan tersebut, maka sudah bisa dipastikan sebuah rakom tidak akan bertahan lama berada di tengah-tengah masyarakatnya. Untuk menjalin kedekatan hubungan antara radio komunitas dengan masyarakat, maka beragam cara digunakan oleh setiap rakom untuk mempertahankan keberadaannya. Berdasarkan penelitian dihasilkan prototipe pada ketiga rakom mengenai metode pengelola rakom untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagaimana diilustrasikan dalam gambar 2 berikut,

Gambar 2. Metode rakom dalam memperoleh kepercayaan masyarakat

Metode rakom melalui berbagai cara ini dilakukan oleh pengelola agar rakom dipercaya sebagai media yang berorientasi pada masyarakat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan bermedia mereka. Selain itu, metode ini juga sebagai upaya pengelola untuk menjadikan rakom sebagai media yang dekat dengan khalayaknya, sehingga khalayak menjadi bagian darinya dan merasa memilikinya. Upaya yang dilakukan oleh pengelola radio komunitas ini semata-mata didasarkan pada spirit mereka untuk memberikan layanan berbasis-masyarakat.

Berbicara tentang layanan berbasis-masyarakat Jim Ife dan Frank Tesoriero (2008) menuturkan latar historis yang mendasari berkembangnya pandangan ini sebagai sebuah alternatif baru dalam pengembangan masyarakat. Dalam sejarah panjang kehidupan manusia, telah banyak berbagai lembaga dan mekanisme untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pada periode zaman yang berbeda, keluarga, suku, kampung, tempat ibadah, pasar dan negara telah memainkan peran-peran penting dalam proses memenuhi kebutuhan manusia tersebut, bahkan seringkali secara kombinasi. Setiap lembaga telah memiliki peran dominan dalam memenuhi kebutuhan manusia, namun dengan berubahnya masyarakat, setiap lembaga tersebut telah terbukti tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tatanan yang baru, meskipun masing-masing lembaga masih menyisakan peran yang semakin kecil pada waktu-waktu berikutnya.

Krisis dalam negara kesejahteraan hanyalah sekadar salah satu contoh dari berbagai transisi historis, di mana negara sebagai tempat menaruh harapan yang sangat besar, menunjukkan ketidakcukupannya pada saat munculnya bentuk-bentuk baru dari struktur-struktur sosial, ekonomi, dan politik (Ife & Tesoriero, 2008: 25) .

Dalam situasi seperti ini, terjadi peningkatan minat pada program-program berbasis-masyarakat sebagai sebuah moda alternatif untuk penyampaian layanan-layanan kemanusiaan dan untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan manusia secara adil (Shragge, 1990; Ife, 1993; Ewalt, Freeman & Poole, 1998; Frellin, 2001, dalam Ife & Tesoriero, 2008: 25). Setelah keluarga, tempat ibadah, pasar dan negara, sekarang mungkin giliran ‘komunitas’ yang memikul tanggung jawab utama untuk menyampaikan provisi layanan-layanan dalam bidang seperti kesehatan, pendidikan, perumahan serta kesejahteraan.

Istilah ‘berbasis-masyarakat’ telah digunakan dalam beragam makna. Dalam perspektif pengembangan masyarakat, layanan –layanan kemanusiaan berbasis-masyarakat merupakan suatu komponen mendasar dari suatu masyarakat alternatif, dan memiliki potensi untuk menggantikan sistem yang ada dengan sesuatu yang lebih kuat berbasis pada prinsip keberlanjutan ekologis dan keadilan sosial/HAM (Ife & Tesoriero, 2008: 218).

Hakikat dari pendekatan kepada layanan kemanusiaan ini ialah bahwa masyarakat harus bertanggungjawab bukan hanya untuk memberikan layanan-layanan, tetapi juga untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan, merencanakan layanan kepada mereka yang membutuhkan, penetapan prioritas dalam lingkup dan diantara layanan-layanan yang ‘bersaing’, dan memantau serta mengevaluasi program-program. Masyarakat sendirilah yang memutuskan apa yang dibutuhkan, bagaimana itu seharusnya diprakarsai, bagaimana itu seharusnya diberikan dan bagaimana itu seharusnya dievaluasi (Ife & Tesoriero, 2008: 219).

Menempatkan tanggung jawab primer untuk penyediaan layanan pada masyarakat lokal, itu artinya masyarakat tersebut harus menggunakan kekuatannya sendiri dalam hal sumber daya manusia dan keahliannya. Layanan juga akan dirancang dan diberikan oleh dan untuk masyarakat tersebut. Dalam hal ini, pengalaman pribadi, pengetahuan lokal, pengertian dan kearifan lokal sangatlah dihargai.

Selain dari spirit pengelola rakom untuk melakukan layanan berbasis-masyarakat, dalam metode rakom juga terselip upaya rakom untuk membangun nilai-nilai sosial masyarakat, misalnya saja pada rakom Baina FM yang mendasarkan rakomnya sebagai media aspirasi masyarakat dengan 5 prinsip operasionalisasi: siap mental, punya jiwa legowo, punya jiwa sosial, harus jujur, dan harus siap dikucilkan. Bisa dikatakan bahwa ternyata rakom juga dapat berfungsi sebagai media penyebar nilai, terutama nila-nilai yang dibangun di lingkungan internal rakom itu sendiri. Ini sudah merupakan satu bentuk pendidikan karakter pada para pengelola dan penyiar rakom.

Dalam pengertian yang luas, Martadi (2010) menyatakan bahwa pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik-buruk, memelihara apa yang baik, dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati (Wahyu, 2011: 140-141). Meski keberadaan rakom bukan sebagai lembaga pendidikan, namun prinsip yang diterapkan di rakom, juga merupakan sebuah proses mendidik karakter pengelola dan penyiar agar memiliki karakter manusia yang baik.

Selain itu, masyarakat dalam suatu komunitas sudah tentu hidup bersama dan berdinamika. Dinamika kehidupan komunitas dalam level kelompok kecil dan dalam konteks daerah yang lebih luas secara simultan mengkonstruksi nilai dan norma yang menjadi pegangan dalam kehidupan bersama (Maring, Hasugian & Kaligis, 2015: 109).

Hal ini juga sejalan dengan salah satu deskripsi klasik tentang radio komunitas yang diformulasikan dalam antologi kisah tentang inisiatif radio komunitas—*A Passion for Radio—*yang dikompilasi oleh Bruce Girard (1992) berikut,

*Community radio [is] a type of radio made to serve people; radio that encourage expression and participation and that values local culture. Its purpose is to give a voice to those without voices, the marginalized groups and to communities far from large urban centers, where the population is too small to attract commercial or large-scale state radio* (Girard, 1992: ix dalam Jankowski, 2002: 7). Radio komunitas merupakan salah satu tipe radio yang didirikan untuk melayani masyarakat. Radio yang menghadirkan ekspresi dan partisipasi masyarakat serta nilai-nilai budaya lokal.

**Jiwa Voluntarisme sebagai Landasan Pengelolaan Radio Komunitas**

Girard mengatakan bahwa “radio komunitas tidak hanya untuk berpartisipasi dalam kehidupan komunitas, tetapi juga mengijinkan komunitas untuk berpartisipasi dalam keberlangsungan stasiun. Partisipasi ini pada tingkat kepemilikan, pemrograman, manajemen, pengarah, dan finansial” (Girard, 1992: 13 dalam Jankowski, 2002: 7).

Adanya partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam operasionalisasi rakom merupakan salah satu unsur kunci konsep radio komunitas, sebagaimana dinyatakan oleh Jurriëns (2003:118), “unsur-unsur kunci konsep radio komunitas adalah akses dan partisipasi”. Akses berarti bahwa semua anggota komunitas mempunyai peluang yang sama untuk menerima siaran sedangkan partisipasi berarti bahwa pendengar secara aktif terlibat dalam manajemen dan produksi siaran radio komunitas.

Keterlibatan masyarakat dalam manajemen dan produksi siaran ini lebih banyak dilakukan pada semua radio komunitas dengan prinsip “kesukarelaan”. Memang siapapun anggota masyarakat boleh dan bisa terlibat di rakom, namun sejauh ini tidak ada satu rakom pun yang memberikan insentif berupa gaji atau upah kepada para pengelola dan penyiar. Hal ini dikarenakan, keberlangsungan rakom lebih banyak didanai dari iuran warga atau bantuan desa. Ini menjadi syarat berlangsungnya rakom yang ditetapkan dalam UU No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran yang mendasarkan operasi rakom bersumber dari swadaya masyarakat.

Belum lagi dalam UU tersebut melarang rakom untuk memasang iklan komersial. Kalaupun boleh beriklan hanya dibatasi untuk iklan layanan masyarakat (ILM) saja. Padahal, dalam sejarah panjang bisnis media, pendapatan utama media ialah dari memasang iklan berbagai produsen. Namun, dengan alasan bahwa rakom didirikan bukan sebagai lembaga bisnis, maka radio komunitas tidak diperbolehkan menjadi lembaga komersial.

Lebih lanjut, dalam UU No. 32/2002 radio komunitas disebut lembaga penyiaran komunitas yang berdasarkan Pasal 21 ayat 1 UU No. 32/2002 memiliki ciri-ciri:

1. Lembaga penyiaran berbadan hukum Indonesia
2. Bersifat independen
3. Tidak komersial
4. Berdaya pancar rendah
5. Daya jangkauan wilayah terbatas
6. Hanya melayani kepentingan komunitasnya saja.

Kemudian tujuan penyelenggaraan lembaga penyiaran komunitas pada pasal 21 ayat 2 UU No. 32/2002 ialah:

1. Tidak mencari laba atau keuntungan atau tidak merupakan bagian perusahaan yang mencari keuntungan semata.
2. Untuk mendidik dan memajukan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan, dengan melaksanakan program acara yang meliputi: budaya, pendidikan dan informasi yang menggambarkan identitas bangsa.

Kebijakan ini jelas sangat membatasi rakom untuk memperoleh pendapatan, meski hanya untuk biaya operasional bersiaran, seperti biaya listrik yang tidak bisa dihindari. Sementara itu, kondisi sosiodemografis dan ekonomi masyarakat juga tidak bisa diharapkan sepenuhnya untuk misalnya membayar iuran warga secara tetap di setiap bulan.

Alhasil para pengelola sangat berempati dengan kondisi ini dengan tidak berharap imbalan finansial dari rakom. Bahkan seringkali, untuk membiayai operasional teknis siaran pun, para pengelola yang harus mengeluarkan dana dari dana pribadi mereka. Belum lagi, adanya kekhawatiran pengelola dengan pertanggungjawaban mereka pada masyarakat apabila memungut iuran dari warga, karena bagi sebagian pengelola rakom masalah keuangan merupakan hal yang sensitif.

Persoalan sumber dana hingga kini bagi sebagian besar rakom memang menjadi kendala terbesar dalam kemampuan bertahan (survivalitas) mereka agar terus berjalan. Pada akhirnya, kreativitas dan inovasi yang dikreasikan oleh pengelola rakom menjadi salah satu strategi yang paling ampuh dalam mempertahankan keberlangsungan rakomnya.

Strategi bertahan hidupnya rakom yang seringkali dilakukan oleh pengelola ialah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik pemerintah (yang utama) maupun lembaga nonpemerintah untuk mengadakan berbagai program, baik *on-air* maupun *off-air,* yang diantara bentuk kerjasama tersebut akan berimplikasi pada biaya produksi radio dan penyelenggaraan kegiatan yang harus didanai oleh lembaga tersebut. Di sinilah kemudian, pengelola rakom berupaya menyisihkan sedikit dari dana yang mereka terima untuk biaya operasional rakom. Sebut saja misalnya, rakom bekerjasam dengan BKKBN untuk menyiarkan berbagai sosialisasi program KB. Materi siaran umumnya disediakan oleh pihak BKKBN, namun bagaimana kemudian materi tersebut dikemas acapkali diserahkan pada pengelola rakom untuk membuatnya, misalnya dalam bentuk jingle iklan, drama singkat atau talkshow dan lain sebagainya, sehingga pihak BKKBN harus memberikan dana untuk biaya produksi siarannya. Dana yang diterima inilah yang kemudian disisihkan sedikit untuk biaya operasional rakom.

Namun tentu saja, dana ini tidak selalu memadai, karena tidak sepanjang waktu kerjasama itu berlangsung. Dalam kondisi seperti ini, maka pengelola ‘berkorban’ mengeluarkan dana pribadi untuk biaya operasional rakom, jika tidak berhasil meminta bantuan dari pihak desa. Hampir semua pengelola rakom menuturkan bahwa rakom bukanlah tempat mereka mencari pekerjaan untuk kemudian mendapatkan penghasilan. Karenanya, para pengelola dan penyiar rakom pastilah memiliki profesi yang lain sebagai sandaran penghasilannya, seperti misalnya ada yang berprofesi sebagai guru, ustadz, pedagang, penjual jasa, buruh, petani, nelayan, dan sebagainya.

Jika ditanya apa motif mereka terlibat di rakom sebagai pengelola, penyiar ataupun pendengar (fans)? Maka ada beberapa jenis motif yang mendasari, antara lain ialah karena: (1) hobi bersiaran dan mendengarkan siaran radio sebagai bentuk hiburan bagi mereka sendiri dan adanya kesenangan karena bisa memberikan informasi dan hiburan bagi masyarakat; (2) ada tujuan ideal yang ingin direalisasikan untuk masyarakat, misalnya membantu para petani untuk meningkatkan kualitas hasil tani dan kesejahteraan hidupnya; dan (3) keinginan untuk membantu masyarakat mengatasi persoalan yang terjadi, misalnya menyelesaikan persoalan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan *human trafficking.*

Dari temuan penelitian ini dapatlah penulis katakan bahwa kesukarelawanan atau voluntarisme menjadi jiwa para pengelola dalam menjalankan radio komunitas. Kiprah mereka di radio komunitas yang tanpa pamrih, dengan lebih mengedepankan kepentingan masyarakat menjadi modal sosial mereka untuk terus mempertahankan radio komunitas agar tetap eksis dan memberikan manfaat bagi masyarakatnya.

Menurut Schroender (1998; Ryan dkk, 2001; dalam Hutapea & Dewi, 2012: 160) relawan ialah individu yang rela menyumbangkan tenaga atau jasa, kemampuan, waktu tanpa mendapatkan upah secara finansial atau tanpa mengharapkan keuntungan materi dari organisasi pelayanan yang mengorganisasi suatu kegiatan tertentu secara formal. Sukarelawan yang bertugas melayani orang lain, memberikan banyak manfaat dan kebaikan bagi banyak pihak dan orang, antara lain kesehatan masyarakat, ikatan sosial yang semakin erat, meningkatkan rasa percaya (*trust*) dan norma timbal-balik dalam komunitas tanpa mengharapkan mendapatkan imbalan dan kompensasi. Dengan kata lain pekerjaan menjadi sukarelawan ‘memberikan’ sesuatu bagi orang lain. Sebaliknya, relawan mendapatkan ‘sesuatu’ dari aktivitas melayani dan membantu orang lain. ‘Sesuatu’ tersebut tentu saja adalah kemanfaatan.

Sementara itu, gagasan modal sosial ialah bahwa seseorang dapat melakukan ‘investasi’ secara sosial sebagaimana secara ekonomis. Modal sosial dapat dilihat sebagai ‘perekat’ yang menyatukan masyarakat — hubungan-hubungan antarmanusia, orang melakukan apa yang dilakukannya terhadap sesamanya karena adanya kewajiban sosial dan timbal-balik, solidaritas sosial dan komunitas (Ife & Tesoriero, 2008: 35).

Lebih lanjut Ife dan Tesoriero menuturkan bahwa bagian dari membangun modal sosial ialah memperkuat terbentuknya masyarakat madani atau masyarakat sipil (*civil society*). Masyarakat madani ialah sebuah istilah yang digunakan untuk struktur-struktur formal atau semiformal yang dibentuk masyarakat secara sukarela, dengan inisiatif mereka sendiri, bukan sebagai konsekuensi dari program atau arahan tertentu dari pemerintah.

Pemikiran ini sangat sejalan dengan kontribusi rakom bagi masyarakat yang dipandang sangat stratgeis oleh UNESCO sebagaimana dikemukakan Claude Ondobo dalam kata pengantar buku *Community Radio Handbook* (2001), berikut paparannya lebih lanjut,

*UNESCO sees community radio as a medium that gives voice to the voiceless, that serves as the mouthpiece of the marginalized and is at the heart of communication and democratic processes within societies. With community radio, citizens have the means to make their views known on decisions that concern them. The notions of transparency and good governance take on new dimensions and democracy is reinforced. Community radio catalyzes the development efforts of rural folk and the underprivileged segments of urban societies, given its exceptional ability to share timely and relevant information on development issues, opportunities, experiences, life skills and public interests. Given the audience’s low literacy rate and radio’s ability to involve women and to treat them not only as object or merely as a target audience, but as participating agents and as a valuable source, community radio becomes one of the most promising tools for community development* (Ondobo dalam Colin dan Estrada, 2001: iii).

Dari uraian Ondobo ini, terlihat jelas bahwa betapa radio komunitas merupakan medium yag memberikan suara pada mereka yang tidak bersuara, yang memberikan corong pada mereka yang termarjinalisasi dan menjadi jantung komunikasi serta proses demokrasi pada masyarakat. Dengan radio komunitas, warga memiliki cara untuk menggunakan pandangan mereka sendiri dalam membuat keputusan yang berpusat pada diri mereka.

Gagasan tentang transparansi dan pemerintahan yang bersih (*good governance*) memuat dimensi baru dan demokrasi pun diperkuat. Radio komunitas juga menjadi katalisator upaya-upaya pembangunan pada masyarakat pedesaan dan golongan yang kurang mampu pada masyarakat urban, kemudian juga memberikan kemampuan yang luar biasa dalam saling berbagi informasi yang relevan tentang isu-isu pembangunan, peluang-peluang, pengalaman-pengalaman, keterampilan hidup (*life skills*) dan kepentingan-kepentingan publik.

Radio komunitas melibatkan audiens yang rata-rata rendah literasi juga kaum perempuan dengan memperlakukan mereka tidak hanya sebagai objek, namun sebagai agen-agen partisipasi dan sumber daya yang bernilai. Karenanya, radio komunitas menjadi salah satu alat yang mampu mempromosikan pembangunan komunitas.

**SIMPULAN**

Radio komunitas merupakan salah satu media alternatif yang memiliki potensi dan fungsi yang strategis untuk membantu mengatasi persoalan yang berkembang di masyarakat dan mengembangkan komunitas.

Tulisan ini mengkaji fenomena di tiga radio komunitas yang menjadi anggota Jarik III Cirebon terutama keberadaan rakom dalam kaitannya dengan membantu mengentaskan persoalan masyarakat.

Kajian didasarkan pada perspektif voluntarisme yang mendeskripsikan temuan bahwa: latar belakang pendirian, tujuan, dan operasionalisasi radio komunitas didasarkan pada kondisi sosiodemografis masyarakat; layanan berbasis-komunitas sebagai spirit pengelola radio komunitas dalam memenuhi kebutuhan komunitas; serta voluntarisme sebagai prinsip kinerja pengelola rakom dalam membantu masyarakat mengatasi berbagai permasalahan menjadi modal sosial untuk terbentuknya masyarakat sipil yang bertumpu pada kemampuan dan inisiatif komunitas untuk berkembang.

**DAFTAR PUSTAKA**

Azarya, Victor. 2000. “Community (Komunitas)”. Kuper, Adam dan Kuper, Jessica. *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial*. Penerjemah Haris Munandar dkk. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Birowo, Antonius, Prakoso, Imam dan Nasir. 2007. *Mengapa Radio Komunitas*. Jakarta: JRKI.

Bosch, Tanja E. 2007. ”Sustaining Community Radio Stations”. *e-journal online*. [www.i4donline.net](http://www.i4donline.net). April 2007. Vol. V, No. 4:27-29.

Fraser, Colin dan Sonia Restrepo Estrada. 2001. *Community Radio Handbook*. UNESCO.

Creswell, John W. 2013. *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Los Angeles: Sage Publication, Inc.

Haryanto, Ignatius dan Juventius Judy Ramdojo. 2009. *Dinamika Radio Komunitas*. Jakarta: LSSP dan Yayasan Tifa.

Hutapea, Bonar dan Fransisca Iriani Roesmala Dewi. 2012. “Peran Kebermaknaan Hidup dan Kepemimpinan Melayani Terhadap Kepuasan Hidup Sukarelawan Lembaga Swadaya Masyarakat”. *Jurnal Insan*, Vol. 14, No. 03, Desember 2012:159-170.

Ife, Jim dan Frank Tesoriero, 2008. *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Penerjemah: Sastrawan Manullang, Nurul Yakin, dan M. Nursyahid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jankowski, Nicholas W. dan Prehn, Ole (eds.) 2002. *Community Media in the Information Age: Perspectives and Prospects*. Creskill, New Jersey: Hampton Press, Inc.

Jurriëns, Edwin. 2003. “Radio Komunitas di Indonesia: ‘New Brechtian Theatre’ di Era Reformasi?”. *ANTROPOLOGI INDONESIA XXVII,* Nomor 72 September 2003:116-130.

Lilis Ch., Dede, Nova Yuliati dan M. Rochim. 2013. “Mengusung Masyarakat Madani melalui Radio Komunitas. *Mimbar*, Vol. 29, No. 2 (Desember, 2013):145-154.

Maring, Prudensius, Fordolin Hasugian, Retor AW Kaligis. 2015. “Social Strategy of Ciliwung River Bank Community”. *Komunitas* 7(1)(2015):102-111.

Miles, Matthew B. dan Huberman Mixel A. 1992. *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Metode-Metode Baru.* Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press.

Mulyana, Deddy dan Solatun. 2007. *Metode Penelitian Komunikasi: Contoh-Contoh Penelitian Kualitatif dengan Pendekatan Praktis*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Ondobo, Claude. 2001. “Preface”. Faser Colin dan Sonia Restrepo Estrada. *Community Radio Handbook*. UNESCO.

Rochwulaningsih, Yety. 2015. “The Role of Social and Cultural Values in Public Education in Remote Island: Case Study in Karimunjawa Islands, Indonesia”. *Komunitas* 7 (1)(2015):25-36.

Sandoval, Marisol. 2009. “A Critical Contribution to the Foundations og Alternative Media Studies”. *International Journal of Communication Studies*, vol. 1, October 2009.

Tucker, Ericka. 2013. ” Community Radio in Political Theory and DevelopmentPractice (Discussion paper). *Journal of Development and Communication Studies*, Vol. 2. Nos. 2/3, July-December, 2013:392-420.

Wahyu. 2011. “Masalah dan Usaha Membangun Karakter Bangsa”. *Jurnal Komunitas* 3 (2)(2011):138-149.

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

<http://jrkjawabarat.blogspot.com/>.

[http://paramadina.ac.id/ article:memberdayakan-komunitas-lewat-radio:berita](http://paramadina.ac.id/%20article%3Amemberdayakan-komunitas-lewat-radio%3Aberita%26Itemid%3D116%26lang%3Din).

1. http://jrkjawabarat.blogspot.com/ [↑](#footnote-ref-1)